

Tinjauan Mata Kuliah

Mata kuliah Hukum Tata Pemerintahan membahas seputar ruang lingkup yang berkaitan dengan hukum pemerintahan, seperti sumber-sumber hukum tata pemerintahan, susunan pemerintahan Indonesia, perbuatan pemerintah, kedudukan hukum para petugas publik, keputusan tata usaha negara, tindakan atas perlindungan hukum di Indonesia, peradilan tata usaha negara, dan pelayanan publik. Secara umum, tujuan yang ingin dicapai setelah mempelajari mata kuliah ini, yaitu mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan dan memahami dasar hukum tata pemerintahan itu sendiri serta cakupannya dalam masyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pembahasan mata kuliah Hukum Tata Pemerintahan terbagi dalam sembilan modul yang saling menunjang dan berkesinambungan secara sistematis.

- Modul 1 membahas istilah dalam hukum tata pemerintahan, ruang lingkungnya dalam ilmu hukum, definisi hukum tata pemerintahan, serta hubungan antara hukum tata pemerintahan dan ilmu sosial lainnya.
- Modul 2 membahas sumber hukum meliputi pengertian pada umumnya, serta dalam arti lainnya, seperti sejarah, filsafat, sosiologi, materiel, dan formil.
- Modul 3 membahas susunan pemerintahan Indonesia yang meliputi susunan organisasi negara tingkat pusat dan daerah.
- Modul 4 membahas perbuatan pemerintah yang meliputi delegasi perundang-undangan, ketetapan pemerintah, *stufen theory*, dispensasi, *vergunning*, lisensi dan konsesi, perintah panggilan dan undangan, serta keabsahan tindak pemerintahan.
- Modul 5 membahas kedudukan hukum para petugas publik yang meliputi pengertian subjek hukum serta subjek hukum tata pemerintahan.
- Modul 6 membahas pelayanan publik yang meliputi pengertian pelayanan publik itu sendiri, hukum pelayanan publik, serta teori dan praktik pelayanan publik.
- Modul 7 membahas keputusan tata usaha negara yang meliputi pengertian keputusan tata usaha negara itu sendiri serta keputusan yang tidak dapat di-PTUN-kan.
- Modul 8 membahas tindakan atas perlindungan hukum di Indonesia yang meliputi pembahasan negara Indonesia yang termasuk negara hukum modern, upaya perlindungan hukum, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- Modul 9 membahas peradilan tata usaha negara yang meliputi keputusan atau penetapan tata usaha negara sebagai pangkal sengketa, organisasi peradilan tata usaha negara, upaya administratif, tenggat pengajuan gugatan, dasar-dasar pengujian, penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara, acara pemeriksaan pendahuluan, acara pemeriksaan perkara di peradilan tata usaha negara, serta alat pembuktian di peradilan tata usaha negara.

Agar mahasiswa dapat menguasai materi mata kuliah ini, ikutilah petunjuk belajar berikut.

1. Bacalah pendahuluan setiap modul dengan cermat sebelum membaca materi kegiatan belajar.
2. Bacalah materi kegiatan belajar dengan cermat.
3. Kerjakanlah latihan sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Jangan melihat kunci latihan, apabila tersedia, sebelum mengerjakan latihan.
4. Bacalah rangkuman setiap kegiatan belajar, kemudian kerjakan tes formatif secara jujur, tanpa melihat kunci jawaban terlebih dahulu.
5. Laksanakan tindak lanjut sesuai dengan prestasi yang Anda capai dalam mempelajari setiap kegiatan belajar.

Jika petunjuk tersebut Anda ikuti dengan disiplin, Anda akan berhasil.

Selamat belajar dan sukses selalu.

Peta Kompetensi Hukum Tata Pemerintahan/IPEM4321/3 SKS



